

MENUJU KONSEP “MAXIMUM LIKELIHOOD”: ISLAM MENJAWAB VOLATILITAS EKSPEKTASI DALAM PEREKONOMIAN

**Ibrahim Kholilul Rohman Havidz Rozaq,
 Satria Utama Soekarjono,
 Nurkholis**
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Abstract

*In terms of the extent of its currency depreciation, many countries in Asia¹ get serious casualty of this financial crisis. It is paradoxical, given the soundness of Asia's economic position in 1996 and the economy's good performance during the first half of 1997, which was supported by tight fiscal policies, prudent monetary policies, and an adequate exchange rate policy. The end result is that the crisis that has afflicted Asia since mid-1997 has radically changed Asia's economic position, with the exchange rate suffering a severe depreciation of around 30 %-80% percent (for some Asian countries observed) between July 1997 and January 1998. One of the most important things behind the screen of this crisis is a term called: **expectation**. Expectation has destroyed stability of many variables: Exchange rate, capital flow, the value of debt, trade balance, and inflation that simultaneously break down the stability of economic condition. Expectation based on condition that in Islamic's perspective: God has cover our heart to think as wise as possible, something non-linear, and –the most dangerous- to act without sense of humanities to other people, or country that suffered by crisis. In more familiar explanation, expectation occurred when individual predicts the next condition given by the assumption, value, and rational thinking. Based on this fact, it must be seen that some space has opened to show Islamic view to solve this crisis. With the very limited ability, this study tried to, explore how Islam manage the expectation and give the obligation that this management will converge in economic stability overtime.*

Khotamallohu 'ala quluu bihim wa'ala sam'ihim wa'ala abshoorihim ghisyaawatun walahum 'adzabun adzim (QS. Al-Baqarah: 7).

PENDAHULUAN

Ekspektasi menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam perekonomian yang semakin multidimensi seperti sekarang. Hal ini menjadi sangat penting karena pada suatu kondisi, ekspektasi bisa melibatkan organ-organ ekonomi yang lain, yang apabila bekerja secara komulatif akan mengakibatkan pergerakan/fluktuasi/volatilitas dalam perekonomian suatu negara. Pentingnya membicarakan ekspektasi tak lepas dari perekonomian global yang semakin

terintegrasi menjadi satu kesatuan. Dalam beberapa konsep ekonomi konvensional, ekspektasi akan membawa banyak pengaruh baik terhadap nilai tukar, volatilitas harga, tingkat suku bunga dan terhadap potensial output.

Tulisan ini bertujuan untuk menguak bagaimana Konsep Islam berupaya meminimalisir efek dari ekspektasi dengan dua pendekatan utama yaitu terhadap **harga dan uang**. Wacana ini kemudian akan dibandingkan dengan pola ekspektasi yang

¹ Specially Thailand, Korea, Malaysia and –of course the worst one --Indonesia

telah terbentuk dalam konsep ekonomi konvensional yaitu kutub *static expectation* (dimana individu dianggap diam dalam melakukan ekspektasinya) dan kutub lain yaitu *rational expectation* (dimana individu sedemikian rupa hingga begitu aktif dalam melakukan ekspektasi berdasarkan informasi yang dimilikinya).

Beberapa *tools* yang digunakan dalam pendekatan ini masih menggunakan *tools* ekonomi konvensional dengan memasukkan variabel "Ekonomi Islami" sebagai sub sistem dari model. Hasil akhir dari tulisan ini, ingin membuktikan bahwa Ekonomi Islami adalah *necessary* dan *sufficient condition* dimana *tools* ekonomi konvensional mencapai taraf "*maximum likelihood*", dimana terjadi kemiripan terhadap *objective* yang paling mendekati nilai absolut.² Meskipun sebagai kerangka analisa adalah tataran ekonomi konvensional (dengan memasukkan beberapa nilai dari sekian banyak Nilai Ekonomi Islami *-price* dan *money*), namun penulis berharap agar tulisan ini bisa menjadi wacana bahwa aplikasi dari sedikit nilai Islam tanpa *melalui ummatic process* tetap bisa membawa kemaslahatan yang lebih baik kepada perekonomian.

Sistematika dalam penulisan kali ini adalah: bagian pertama akan membahas tentang besaran makroekonomi dikaitkan dengan unsur ekspektasi, bagian kedua akan membahas bagaimana ekspektasi terbentuk dalam perekonomian konvensional dan efek yang ditimbulkannya. Bagian ketiga akan

² Dalam term ini penulis tidak menggunakan maximum likelihood dalam artian harfiah ekonometri, melainkan hanya sebuah proses untuk mencapai gambaran kondisi idial yang diinginkan. Dalam konsep ekonometri, *Maximum Likelihood* adalah upaya pemiripan terhadap *actual value* dari *predicted value* yang dibuat. Misalnya, bagaimana agar Y yang dimiliki = Y potensial yang seharusnya tercapai atas suatu faktor produksi yang digunakan dengan memaksimalkan probabilitas antara Y actual dan Y predicted. Lawan ML adalah *Ordinary Least Square* di mana tujuannya sama namun pendekatannya adalah bagaimana agar deviasi dari Y potensial terhadap Y actual seminimal mungkin.

membahas bagaimana Konsepsi Islami membahas tentang ekspektasi dengan dua macam pendekatan yang digunakan, yaitu harga dan uang. Bagian keempat akan menjelaskan studi komparasi antara hasil yang didapat dari pendekatan yang dilakukan (ekonomi konvensional dan Ekonomi Islam). Bagian kelima adalah kesimpulan, saran dan keterbatasan studi.

MAKRO EKONOMI DENGAN UNSUR EKSPEKTASI

Bagian ini akan membahas bagaimana ekspektasi menjadi begitu pentingnya dalam perekonomian internasional, terutama bagi negara yang *small and open economy*. Dasar yang dipakai dalam pendekatan ini adalah Model **Mundell Flemming**³, dengan asumsi setiap negara berusaha "mengikuti alur yang sudah ada", sehingga menggunakan rezim *floated exchange rate*. Persamaan-persamaan berikut akan menggambarkan kondisi perekonomian untuk beberapa sektor:

$$Y = C(Y) + I_r + G + X(E) - EIM(Y, E) \quad (1)$$

$$L(Y, r) = D + R \quad (2)$$

$$R^o = dR/dt = X(E) - EIM(Y, E) + K(r - r^f) \quad (3)$$

Total diferensial dari persamaan di atas adalah:

$$(1 - C_y + EIM_y)dY - I_r dr - (XE - IM - EIME)dE = dG \\ LYdY + Lrdr = dD + dR(-EIM_y + (XE - IM - EIME)dE + Krdr = dR^o + Kr^f dr^f)$$

Total diferensial di atas dalam matriks akan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} (1 - C_y + EIM_y) - I_r - A \\ L_y & L_r & 0 \\ - EIM_y & Kr & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dY \\ dr \\ dE \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & Kr^f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dG \\ dD \\ dR^f \end{bmatrix} \quad (4)$$

dengan $A = XE - IM - EIMY$

³ Materi kuliah Anwar Nasution, Ekonomi Uang dan Bank Lanjutan, diperdalam pada bahan matakuliah *Advanced Macroeconomics*, Ari Kuncoro, FEUI 2001

Persamaan (1) menggambarkan perekonomian sektor riil di mana potensial output (Y) diupayakan akan sama dengan domestic absorption (C+I+G) dan *net eksport*, dengan kata lain terdapat keseimbangan *Demand – Supply*. **Persamaan (2)** menggambarkan persamaan *liquidity money* yang menggambarkan real money supply sebagai hubungan dengan *preferensi* individu atas *money demand*. **Persamaan (3)** menggambarkan perubahan cadangan devisa atas perubahan dalam balance of payment. **Persamaan (4)** adalah total diferensial dalam bentuk matriks.

Dengan metode Cramer's, akan bisa dilihat efek perubahan satu variabel terhadap variabel yang lain. Misalnya, dalam paper ini kita berfokus pada perubahan nilai tukar terhadap besaran yang lain:

- perubahan nilai tukar dan dampaknya bagi cadangan devisa:

$$\frac{dE}{dR} = \frac{Ir E IMy - Kr(1 - Cy - EIMy)}{Lr(1 - Cy) - LyKr + IrLy} \quad (-)$$

jadi total effect-nya adalah positif (5)

- perubahan nilai cadangan devisa terhadap GDP $\frac{Ir E IMy - Kr(1 - Cy - EIMy)}$

$$\frac{dY}{dR} = \frac{(1 - Cy + EIMy)A - (AA)Ly + (AEIMy)AA}{Lr(1 - Cy) - LyKr + IrLy} \quad (+)$$

(6)

- Dengan demikian bisa didapatkan, nilai dari efek perubahan nilai tukar terhadap GDP nasional:

$$\frac{dY}{dE} = \frac{dY}{dR} \cdot \frac{dR}{dE} = \frac{(1 - Cy + EIMy)A - (AA)Ly + (AEIMy)AA}{IrE.IMy - Kr(1 - Cy - EIMy)}$$

(7)

Nilai (dY/dE) di atas adalah ambigu, bisa menjadi positif dan negatif tergantung dari

A (kesehatan dari *trade balance*) yang berarti tergantung pada elastisitas ekspor dan impor dalam *Marshall Learner Condition*.

$$A = IM [\eta_{XE} (X/E.IM) + \eta_{IME} - 1] \quad (8)$$

Karena $A > 0$, untuk kondisi *trade balance* yang sehat, maka:

$$\eta_{XE} + \eta_{IME} > 0 \quad (9)$$

Dengan kondisi bahwa ekspektasi telah bisa menjadi *latent* pada beberapa macam variabel yang menyebabkan nilai dari besaran-besaran di atas mudah sekali berubah, misalnya tingkat suku bunga domestik dipengaruhi oleh tingkat suku bunga luar negeri di-*adjust* oleh **expected depreciation** ($i = i^* + e$) dari nilai tukar mata uang dalam negeri. Tingkat harga sekarang adalah tingkat harga tahun lalu di-*adjust* oleh **expected inflation** ($p = p_{t-1} + \pi^e$). Potensial output terbentuk dari potensial output pada tahun sebelumnya diadjust oleh *expected* perubahan harga ($Y = Y_{t-1} + \beta(P - P^e)$). Gambaran lain yang cukup *sophisticated* melukiskan begitu besarnya ekspektasi mempengaruhi ekonomi adalah kemungkinan terjadinya *capital flight* dalam perekonomian, seperti yang terjadi untuk kasus Indonesia berikut:⁴

⁴ Data penghitungan menggunakan pendekatan Manuel Pastor dalam mengobservasi capital Flight dari Latin Amerika. Penghitungan di atas didapatkan penulis pada penugasan paper matakuliah Seminar Ekonomi Moneter, Anwar Nasution

Tabel 1.
Capital Flight di Indonesia, 1980-2000

Tahun	Capital Flight*
1980	3888
1981	-443
1982	-6582
1983	-3555
1984	-828
1985	-2496
1986	-5129
1987	3720
1988	-310
1989	1821
1990	-789
1991	-2970
1992	-7263
1993	-1425
1994	-496
1995	-1290
1996	1462
1997	2859
1998	84110
1999	-1663
2000	-10764

* penghitungan dengan kalkulasi Pastor (1990) dihitung dengan satuan US \$ Milyar.

Fakta di atas melukiskan betapa stabilitas perekonomian bisa menjadi kacau atas terjadinya efek dari ekspektasi (meskipun untuk kasus *capital flight* di atas, ekspektasi bukan merupakan faktor utama, meskipun juga bukan faktor sepele yang mempengaruhi terutama untuk tahun 1998). Oleh karena itulah, efek ekspektasi bisa juga mempengaruhi perbedaan prediksi *individual effect* dari model Mundell Flemming akibat melekatnya unsur ekspektasi tersebut secara intrinsik pada beberapa variabel seperti yang diungkapkan di atas. Dengan demikian cukup jelas bahwa ekspektasi menjadi bagian penting dalam perekonomian yang perlu di-*managed* untuk menghindari fluktuasi pada perekonomian itu sendiri.

EKSPEKTASI TERBENTUK DALAM EKONOMI KONVENSIONAL

Ketika perekonomian negara semakin meningkat dengan kadar informasi yang terus berkembang, timbul suatu permasalahan di mana akan lahir sebuah fase ketika upaya pemerintah sudah tidak lagi mampu menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat. Pada pembahasan kali ini, penulis akan menghadirkan dua jenis ekspektasi yang akan ada dengan semakin kompleksnya kehidupan ekonomi masyarakat, yaitu ekspektasi static dan ekspektasi rasional:

Untuk menganalisisnya, persamaan berikut akan menggambarkan perekonomian di beberapa sektor:

$$y = \delta y_{-1} + \beta (p^e - p) + u \quad (8)$$

$$y = \theta (m - p) + v \quad (9)$$

$$m = M + \gamma y_{-1} \quad (10)$$

$$p^e = 0 \quad (11) \text{ untuk static}$$

$$p^e = E(p-1) \quad (12) \text{ untuk ratex}$$

Persamaan (8) menggambarkan keseimbangan jangka panjang, di mana fluktuasi dari output/pergerakan dari output tergantung disparitas ekspektasi masyarakat terhadap level harga. Dalam hal ini berlaku kondisi bahwa peningkatan output hanya terjadi jika masyarakat tidak sadar terhadap suatu kebijakan (*unanticipated condition*), walaupun dengan kondisi ini tetap saja terdapat *adjustment* untuk mengembalikan output ke level jangka panjang. **Persamaan (9)** menggambarkan hubungan pada pasar uang dimana potensial output terbentur atas pola pergerakan kurva LM (*LM vertically sloped*) **Persamaan (10)** menggambarkan *policy* pemerintah, apakah pemerintah menganut *policy* aktivis/interventionist (dimana nilai $\gamma = -1$, jika output di atas output rata-rata pemerintah akan mengurangi peredaran uang) atau netral dengan nilai $\gamma = 0$. **Persamaan (11)** menggambarkan pola ekspektasi yang dibangun yaitu *static expectation*.

Dengan adanya kondisi ekspektasi yang statis, hasil dari "general condition" adalah sebagai berikut:

$$y = \left[\frac{\delta + \gamma\beta}{1 + \beta/\theta} \right] y_{-1} + \left[\frac{\beta M}{1 + \beta/\theta} \right] + error \quad (12b)$$

Dengan demikian terdapat sebuah *policy relevant* di mana pemerintah mampu untuk membentuk suatu level perekonomian dengan mempengaruhi tingkat potensial output sesuai dengan yang diinginkan. Katakanlah dengan γ adalah *policy reaction function* terhadap disparitas output, dan M adalah *policy* terhadap jumlah uang beredar, maka dengan *static expectation* pemerintah mampu membentuk level perekonomian dimana terdapat *steady state* $y = y_{t-1}$, jika $\gamma = -\delta/\beta$, dan $M=0$. Dari sini terlihat dalam kondisi masyarakat yang diam terhadap ekspektasinya, pemerintah bisa mengakali terbentuknya kestabilan potensial output dengan *policy* di atas (membiarkan jumlah uang beredar tetap dan melakukan *policy function* sedemikian γ memiliki nilai di atas). Minimisasi ini melahirkan varian minimum menjadi hanya berupa varian dari error di persamaan atas.

Namun jika yang dipakai adalah *rational expectation*, dengan operasi ekspektasi, hasil akhir yang diperoleh adalah:

$$p - p_e = \frac{y - \delta y_{-1}}{\beta} \quad (13),$$

dengan substitusi ke persamaan awal didapatkan pers:

$$y = \delta y_{-1} + \frac{(\theta/\beta)u + v}{(1 + \theta/\beta)} \quad (14)$$

Dengan demikian terlihat bahwa, dengan semakin majunya teknologi dan dengan semakin meningkatnya level pengetahuan maka nyaris upaya pemerintah tersebut tidak

akan bisa mampu untuk mempengaruhi potensial output yang ada. Kemungkinannya adalah perekonomian bisa berjalan tanpa harus ada campur tangan pemerintah **Persamaan (14)**. Kondisi perekonomian tahun lalu adalah musabab utama kondisi perekonomian sekarang, selebihnya adalah faktor *gallat* yang mempengaruhi ekonomi.

PREDIKSI KEDEPAN

Prediksi ke depan yang diangkat dalam paper ini adalah bagaimana cabang ekonomi yang merupakan *tools* utama dalam melakukan *forecasting*, yaitu ekonometri mampu memberikan solusi dan jalan keluar terhadap permasalahan ekonomi akibat ekspektasi ini. Dengan bentuk dasar model ekonometri adalah:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + error \quad (15)$$

Econometric prediction untuk *ekspektasi static*:

Dimana Y adalah besaran yang akan diprediksi dengan masing-masing X_1 dan X_2 adalah variabel independen, maka didapatkan:

$$Y = \frac{\delta y_{-1}}{(1 + \beta/\theta)} + \frac{\beta m}{(1 + \beta/\theta)} + error \text{ term} \quad (16)$$

Prediksi ke depan dari *static expectation* adalah **invarian** bagi pemerintah. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada *policy* pemerintah yang nampak dalam prediksi statis di atas. Dimana jika dicocokkan dengan model ekonometri dasar, tidak nampak estimator yang melambangkan *reaction function* dari pemerintah karena nilai $\alpha_0=0$, $\alpha_1=(\delta/1+\beta/\theta)$ dan $\alpha_2=\beta/1+\beta/\theta$

Econometric prediction untuk *rational expectation* adalah:

$$Y = \left[\delta - \frac{\beta\gamma\theta}{\beta + \theta} \right] y_{-1} + \left[\frac{\beta\theta}{\beta + \theta} \right] m - \left[\frac{\beta\theta}{\beta + \theta} \right] - M + error \text{ term} \quad (17)$$

dengan $\phi = \beta\theta/(\beta+\theta)$, maka modifikasi dari persamaan di atas adalah :

$$Y = (\delta - \phi\gamma) y_{-1} + \phi m - \phi M + \text{error term} \quad (18)$$

Dari sini lahir apa yang disebut dengan *policy irrelevant* dalam persamaan ekonometri sebab kebijakan pemerintah itu sendiri akan mengakibatkan *objective* yang dikenai kebijakan menjadi bergerak. *Ekspektas* rasional ini tidak hanya mengakibatkan *policy* pemerintah tidak dimungkinkan untuk dilakukan bahkan bisa mengakibatkan salah sasaran akibat bergesernya estimator.

Dari persamaan di atas terdapat dua sumbu utama dalam *forecasting* ekonomi yang dihasilkan, di satu sisi terdapat apa yang disebut *policy irrelevant* karena dalam kondisi ini pemerintah tidak mungkin dapat melakukan *policy*. Namun juga terdapat apa yang disebut dengan *policy invarian* dimana pemerintah justru akan menghadapi obyek bergerak yang apabila dikenai kebijakan malah akan menyebabkan *policy* tersebut salah sasaran. Kedua kondisi ini adalah efek terbentuknya ekspektasi bagi perekonomian konvensional.

EKSPEKTASI DALAM ISLAM

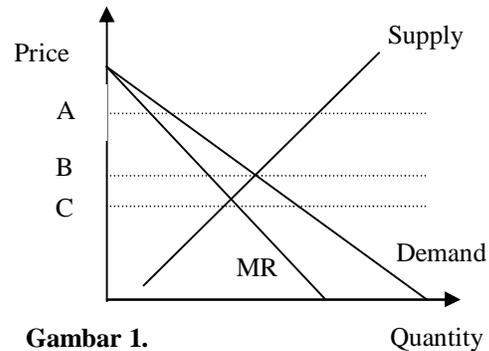
Dari beberapa literatur yang didapatkan, dasar-dasar nilai yang membentuk ekspektasi dalam Islam adalah:

Harga

Islam tidak berkehendak untuk melakukan perlawanan terhadap fluktuasi dari harga. *Price intervention* hanya akan melahirkan kolusi dan keuntungan bagi pihak tertentu saja.⁵ Kondisi pasar adalah interaksi antara *supply* dan *demand* (ya ayyuhalladzi naamanuu la ta'kuluu amwaalakum bil baathili illa an takuuna tijaarotan an taradzin minkum, QS Annisa, 29). Hanya

⁵ Islamic Economics, Module of Certified Islamic Financial Analyst (CIFA). Universitas Indonesia Center for Middle east in corporation with Muamalat Institute.

dalam kondisi terjadinya distorsi pasar campuran pemerintah tersebut dilakukan. Misalnya dalam kasus monopoli, pemerintah akan melakukan intervensi sampai dengan tercapainya *reasonable price*. Seperti yang dijelaskan dalam konsep *Ibnu Taimiyyah's Price*.



Gambar 1. Quantity

Dari model Ibnu Taimiyyah di atas dapat dilihat bahwa dalam kondisi normal harga akan senantiasa berada dalam level keseimbangan. Pada level keseimbangan ini harga tidak boleh diatur oleh pemerintah dengan berbagai macam intervensinya.⁶ Intervensi pada model di atas baru terjadi, misalnya pada *market failure*, yaitu monopoli- karena memang

⁶ Pasar adalah pola interaksi antara penjual dan pembeli agar mendapatkan suatu barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. upaya untuk menciptakan *disequilibrium* pada pasar, misalnya kegiatan yang bertujuan untuk meng-cut off- alur distribusi, sebelum sampai di pasar (*Talaqorrukban*), dilarang oleh Rasulullah SAW, "janganlah kamu mencegat pedagang di tengah jalan karena pemilik barang berhak memilih setelah sampai di pasar apakah menjual kepada mereka yang mencegat ataupun kepada orang lain yang dikehendaki" untuk tetap mencapai keseimbangan pasar. Pasar memiliki independensi dari pemerintah. Intervensi pemerintah terjadi jika keadaan dalam pasar terancam. Jika terdapat ketidaksesuaian harga, maka sepenuhnya –penyelesaian diserahkan di pasar. Atas suatu kondisi normal (tidak adanya penyimpangan atau pelanggaran). pemerintah dilarang memaksa orang untuk menjual barang di bawah harga yang mereka ridloi. Untuk mengoptimalkan *market clearing* ini operasi pasar terbuka digalakkan oleh Rasulullah untuk melihat kondisi pasar. (Yusuf Al Qordhowi, Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam, hal 180)

dalam beberapa bidang ekonomi, monopoli mutlak masih diperlukan, pemerintah wajib menjaga agar tetap terjadi keseimbangan dalam pasar. Pada titik A, dimana terjadi *floor price* pemerintah diharapkan membantu konsumen sehingga masih memiliki kemampuan beli pada level keseimbangan, sebaliknya jika kondisi perekonomian ada pada posisi C, *ceiling price*, pemerintah juga diharuskan membantu produsen (dengan subsidi, dan sebagainya) sehingga *loss* dari produsen bisa tertanggung, maka baik produsen maupun konsumen tetap berada pada level keseimbangan pasar.

Selain tidak adanya intervensi, terdapat tiga nilai dalam konsep harga Islam, yaitu nilai *socioeconomic policy*, *knowledge induce* serta konsep *intrinsic value* (selain konsep sentral, yaitu *syari'ah*, sebagai payung dari *value* dan *norm* yang dipakai). Konsep *socioeconomic policy* membawa kenyataan bahwa terdapat variabel non-ekonomi yang mempengaruhi *level* harga. Sedangkan konsep *knowledge induced* menggambarkan bahwa dalam setiap pergerakannya *overtime*, harga dalam Islam akan menuju keseimbangan dengan adanya konsep *ummah* (kerjasama antara produsen dan konsumen dalam *disequilibrium* pasar) dan meningkatnya level pengetahuan dari pelaku ekonomi. Dalam konsep intrinsik ini, nilai dari harga faktor maupun harga output akan relatif tidak berfluktuasi. Dalam hal ini akhirnya dimungkinkan terjadi **interaksi-integrasi dan evolusi** dari preferensi yang ada dalam individu.

$$\{\geq_{ijk}(\theta_{ijk})\} = \{\geq_{ijk}(\theta_{n^*})\} \quad (19)$$

Persamaan (19) menggambarkan prinsip *knowledge induced* (θ): i: melambangkan interaksi antar preferensi yang dibuat masing-masing individu, j menggambarkan agen ekonomi yang terlibat, k adalah sistem yang ada pada perekonomian tersebut. $i = 1, 2, 3, \dots, n$. $j = 1, 2, 3, \dots, m$, $k = 1, 2, 3, \dots, s$. Kondisi akhir dari persamaan ini adalah terjadinya (θ_{n^*}) yang merefleksikan

konvergensi dari θ value terhadap transaksi ke-n. Hal ini menggambarkan dengan konsep Islam semua individu diharapkan memiliki konvergensi atas preferensi yang dimilikinya. Meminjam istilah *Marshallian Demand Function*, untuk setiap komoditi kemudian akan didapatkan fungsi permintaannya sebagai berikut:

$$x_1 = (x_2, p_1, p_2)(\theta), \quad x_2 = (x_1, p_1, p_2)(\theta), \quad \text{dengan} \\ dp_1/dp_2 > 0 \quad \text{dan} \quad dx_1/dx_2 > 0 \quad (20)$$

dalam **Persamaan (20)** didapatkan bahwa dengan adanya konvergensi *knowledge induced* didapatkan $\theta \rightarrow \theta^*$, ini berarti bahwa preferensi akan konvergen. Fungsi permintaan di atas harus dipotongkan dengan fungsi penawaran yang mana perusahaan berada pada struktur pasar *perfect competition* (*long-run zero profit*), maka didapatkan struktur *cost* perusahaan dan level harga yang diminta adalah sebagai berikut:

$$P_1s = (C_1/X_1) (\geq \theta^*) \quad (21)$$

dengan C adalah cost

$$P_1d = f(x_1, x_2, p_2) (\geq \text{snd}(\theta^*)) \quad (22),$$

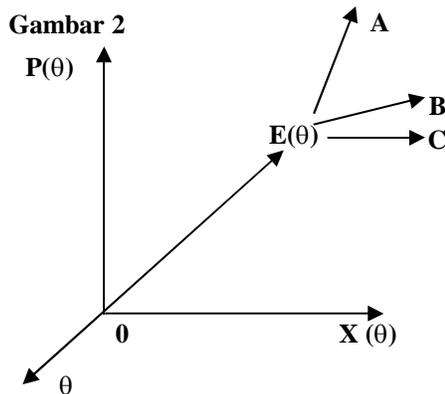
harga yang diminta di pasar.

Maka dalam *market clearing* diharapkan terjadi:

$$(p_1d - p_1s) (\geq \theta^*) = f(x_1, x_2, p_2) - (C_1/X_1) (\theta^*) \quad (23)$$

Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan konsep di atas seperti dalam eq (23), masih memungkinkan adanya *disequilibrium* pada harga, bahwa akan mungkin terjadi *excess demand* (yang memaksa harga naik) maupun *excess supply* yang memaksa harga turun. Namun dalam konsep *ummah* hal tersebut akan dilebur dengan adanya kerja sama antara produsen dan konsumen ketika terjadi *disequilibrium* tersebut. Kerjasama (atau apapun yang kemudian akan dilakukan oleh produsen dan konsumen dalam menyiasati

level *disequilibrium* di pasar) akan memungkinkan lintasan *future price* sesuai apa yang diinginkan kedua pihak. Jadi *disequilibrium* harga kemudian tidak perlu di-*respons* dalam bentuk *expected* inflasi. Kemungkinan-kemungkinan jalur dari harga pasca *disequilibrium* tersebut bisa dilihat dalam *trajectories* berikut:



Dari gambar di atas terlihat bagaimana *knowledge induced* mempengaruhi keadaan harga pada masa datang, taruhlah semua kondisi pasar dalam *market clearing* sampai dengan titik $E(\theta)$, dan setelah itu terdapat *disequilibrium* pada pasar, maka pelaku ekonomi itu sendiri yang akan menentukan ke mana level harga akan berjalan ke titik A, B atau C. Dengan demikian terhindar efek ekspektasi seperti yang terjadi dengan konsep harga eksogen konvensional. Dari sini kesimpulan dari konsepsi harga adalah: tidak adanya intervensi pemerintah dalam menentukan tingkat harga yang berlaku di pasar, kecuali terjadi *market failure*, dan atau *external shock* di mana pemerintah diharuskan campur tangan bahkan dengan tindakan yang tegas.⁷ Semakin rendahnya

⁷ Hal ini bisa dilihat dari *Expenditure Reducing Policy* yang pernah dilakukan pada zaman kekhalifahan. *Policy* ini ternyata sudah ada (bahkan sangat dikuasahkan untuk diterapkan dengan tegas dalam masa pemerintahan Islam) di mana negara berhak mengontrol pengeluaran

kemungkinan munculnya ekspektasi pada harga sebab penyelesaian disparitas harga dalam Islam sesuai dengan azas *ummah* dan *knowledge induced* yang merupakan kerjasama antara produsen dan konsumen untuk menentukan harga baru setelah pada level point $E(\theta)$, tingkat harga tidak seimbang.

Dengan kata lain pelaku pasar sudah akan tahu ke mana pergerakan dari harga jika pada suatu kondisi terjadi *disequilibrium* pada pasar (namun selama tidak ada gangguan pasar, maka yang terjadi adalah pelaku ekonomi tidak memiliki ekspektasi apa-apa dalam hal ini berlaku *static expectation*).

Uang

Uang memegang peranan penting dalam sejarah kehidupan Ummat Islam. Dalam hal

uang oleh pejabat-pejabatnya (walaupun atas harta pribadinya). Jika *behavior* dari pejabat ini bisa membahayakan tingkat harga yang ada di pasaran (misalnya gemar memborong). Pemecatan adalah buah yang harus ditanggung apabila terjadi penyelewengan atas penggunaan uang negara. Pemerintah berhak memberhentikan pembelanjaan rakyatnya apabila ditengarai bahwa pembelanjaan tersebut merugikan kelompok masyarakat yang lain atau menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan komoditas yang haram. Akibat dari pengencangan ikat pinggang ini bagi Islam adalah sesuatu yang luar biasa seperti juga pada jaman Rasulullah SAW di mana berkat pola hidup sederhana umat Islam menjadi tahan dengan berbagai boikot ekonomi yang dilakukan oleh musuh Islam saat mengalami boikot di Syiib (eksternal shock yang tidak diduga). Umar Bin Khotob pernah merampas 50% dari harta Gubernur Mesir, Amr Ibn Al Ash yang hidup dengan mewah agar menjadi peringatan bagi pejabat yang lain untuk memberikan teladan bagi para rakyatnya (Muhammad Khalid Arrijal, Ibid).

Pada suatu masa krisis, Umar RA pernah melarang rakyatnya untuk tidak memakan daging 2 hari berturut-turut. Walaupun mampu untuk membelinya Alasannya adalah bahwa daging sat itu amat sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat di Madinah. Umar RA tidak segan untuk mencambuk siapa saja yang melanggar perintah ini. (Makalah Syaikh Ali Al Khofif "Kepemilikan dan Batasannya dalam Islam" Buku Mu'tamar Pertama bagi Majma'yul bahast Al Islami.)

AsySyablanji. Nur Al Abshoor. Dar El Fikri, Beirut hal 16

ini, tulisan ini membagi konsepsi uang ke dalam dua pendekatan: pendekatan *syari'ah*, di mana dalam hal ini mendasarkan *values*-nya berdasarkan sejarah Rasulullah), dan pendekatan multidimensi yang relatif muncul akibat kekurangan dan kelemahan dalam konsep uang dalam ekonomi konvensional. Berdasarkan nilai-nilai sejarah konsep uang dalam Islam ditandai dengan.

1. **Pelarangan dalam penimbunan uang (emas dan perak)**⁸, dimana dalam hal ini interpretasi yang bisa diambil adalah begitu pentingnya *Velocity of Money* dalam konsepsi Islam. ...*walladzina yaknizuna adzhaba walfidhota wala yunfikunaha fii sabilillah, fabasyirhum biadzabin aliiim. QS. At-taubah 34*). Point ini memungkinkan setiap masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan uang tersebut dan tidak terjadi *economic rent* atas keberadaan uang bagi golongan yang mampu.⁹ Point ini dalam ilmu

moneter bisa didekati dengan persamaan *money demand* klasik:

$$MV = PT \quad (24)$$

Given semua variabel uang beredar dan harga-harga barang, meningkatnya *money supply* bisa diindikasikan sebagai Bergeraknya perekonomian dengan semakin giatnya transaksi terjadi sehingga dimungkinkan *overall effect* nya adalah kesejahteraan bagi masyarakat.

2. **Penggunaan uang yang bernilai intrinsik**¹⁰

Penggunaan uang yang bernilai intrinsik ini (yang kemudian dalam teori modern moneter Islam berkembang menjadi *endogenous theory of money*) akan menjamin stabilitas dari nilai uang. Dengan kondisi ini dimungkinkan akan senantiasa terjadi kesamaan antara uang dua negara tertentu (dengan catatan intrinsikitas adalah hal kualitas mata uang sama antar kedua negara tersebut).

Dengan persamaan *money demand*:

$$M/P = L(I, Y) \quad (25)$$

$$M^*/P^* = L^*(I, Y) \quad (26)$$

Dalam Purchasing Power parity (law of One price) berlaku:

$$P = e P^* \quad (27)$$

maka dengan substitusi didapatkan:

$$e = \frac{ML^*(Y^*, I^*)}{M^*L(Y, I)} \quad (21)$$

⁸ Diriwayatkan dalam hadist rasulullah SAW "Tidak ada seorangpun yang menimbun uang kecuali orang-orang yang berdosa, Yusuf Al Qordhowi. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fiqtisodil Islam: Islami Makhabbah wabbah, Cairo, 1415*

⁹ Penyelewengan atas hal ini benar-benar berdampak buruk bagi perekonomian Islam ketika pada kekhalifahan pasca Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa khalifah Bani Umayyah muncul pola kehidupan Hedonis di mana masyarakat (elit pejabat) yang memiliki cadangan emas berlebihan sehingga dapat hidup dengan foya-foya dan menimbulkan kesenjangan dan pemberontakan (As Syuyuthi, *Tarikhul Khulafa, Dar-El Fikr, Beirut, hal 192-196*).

Dalam kaitan ini pula, Khalifah Abu Bakar memaklumkan perang terhadap suku-suku Arab yang menolak untuk membayarkan sebagian hartanya dan menimbunnya (Muhammad Asyarbini, *Allqna': Thoha Putera Semarang, Vol I hal 183*). Dalam hal ini, perang itu adalah perang pertama Islam atas pembangkang yang menimbun yang merugikan kaum miskin⁹. (Muhammad Khalid, *Ar Rojal Haular Rosal, Dar-El Fikr Beirut hal 70*). Ancaman yang lebih keras atas dalil ini adalah Abu Dzar Al Ghiffani, salah seorang sahabat nabi, dengan berdasarkan ayat Al Qur'an At-taubah ayat 34 di atas. Pendapat Abu Dzar adalah pelarangan bagi masyarakat untuk menimbun harta kecuali hanya untuk kebutuhan sehari-semalam saja. Ungkapannya yang paling terkenal adalah: Aku heran

kepada mereka yang tidak memiliki makanan di rumahnya, mengapa mereka tidak keluar menuju rumah para penimbun dengan menghunus pedang. Hal ini terjadi ketika di Syam- tempatnya tinggal terjadi kesenjangan yang amat melebar. Intinya adalah betapa Islam sangat mementingkan aspek kelancaran dalam distribusi uang (*velocity of money*).

¹⁰Islam dan Sistem Moneter yang adil, Majalah Hidayatullah, Edisi 11/th X. April 1994. Hal 44

Dengan kondisi bahwa setiap negara memiliki kandungan emas dan atau perak yang sama, maka dari persamaan di atas tentu bisa disimpulkan bahwa *volatilitas* nilai tukar mata uang relatif sangat terbatas. Apalagi dengan konsepsi *liquidity preference* yang hanya dipengaruhi oleh *kebutuhan transaksi* dalam Islam sehingga memungkinkan tidak adanya disparitas (atau disparitas yang kecil) dari nilai tukar mata uang antar negara, atau nilai tukar mata uang itu sendiri *overtime*. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dalam sejarahnya, konsep uang tunggal ini tetap pernah mengalami distorsi meskipun kemudian dapat diatasi oleh kekhalifahan pada waktu itu).¹¹

Dari dua point di atas, beberapa hal yang bisa ditarik dari unsur intrinsikitas uang dan *velocity* uang yang tinggi dalam Islam adalah semakin kecilnya kemungkinan deviasi nilai tukar yang berarti semakin minimalnya kemungkinan berekspektasi bagi setiap individu.

VARIABEL MONETER DARI PERSPEKTIF ISLAM MULTIDIMENSI

Konsep uang dalam Islam haruslah memiliki prinsip *Endogenous of Money* yang menjamin nilai uang lebih stabil. Dalam

¹¹ Dalam sejarahnya, pada masa Bani Umayyah terdapat pembaharuan dengan keberbedaan kualitas emas yang ada kemudian standar uang terganggu, sehingga yang dilakukan kemudian oleh Abdul Malik bin Marwan adalah dengan melebur seluruh uang tersebut jadi satu dan mencetaknya sebagai uang baru negara Islam. (As Syuyuthi, *Ibid hal 203*) Ketika kemudian Sultan Mamluk- Korps pengawal Istana Dinasti Ayyub berhasil merebut kekuasaan di Mesir--yang kemudian memberontak pada Abad 14, dinasti ini mendekritkan uang tembaga dan menimbun uang dinar dan dirham (*Kifayatul Akhyar 239*) timbullah kegoncangan dalam pasar meskipun pada saat tersebut sudah dinasehatkan oleh Syaikhul Islam, Ibn Attaimiyyah (Seorang Imam yang lahir di Hannan, dekat Damaskus, ulama Madzhab Hambali, yang tidak mau bertaklid kepada imam madzhab manapun kecuali tahu dasarnya)

konsep dasar ini, penulis mengeksplorasi keberadaan pasar uang dengan dua komponen yang "baru" --seperti halnya dalam konsep harga--yang bersifat stabilizer dalam perekonomian Islam, yaitu nilai θ dan X , masing-masing adalah *level pengetahuan masyarakat* dan *socio economic variables*.¹²

Berdasarkan fungsi permintaan dan penawaran akan uang:

$$M_d = M_s = M(X, Y, \theta). \quad (29)$$

Dalam kondisi ini X merefleksikan *socioeconomic variable* (bagaimana kondisi-kondisi non-ekonomi mempengaruhi kebijakan moneter di suatu negara). Y adalah *policy variable*, yaitu bagaimana pemerintah dengan otoritas moneternya menjamin kelangsungan suatu *policy* untuk menjaga stabilitas dari parameter-parameter ekonomi, dan walaupun belum cukup individu yang kemudian akan nampak berperan dalam menjamin stabilitas perputaran uang. θ melambangkan *knowledge-induced variabel*, dalam hal ini transisi pengetahuan akan membuat level permintaan akan uang berbeda-beda dan relatif dinamis terhadap perubahan pengetahuan masyarakat. Karenanya dalam konsep Islam berlaku *endogenous money*, di mana *money demand* menentukan level dari *money supply* dan *money supply* senantiasa menyeimbangkan pergerakan *money demand* dalam membentuk *market clearing*. Dalam kondisi *money* yang bersifat endogen peran individu adalah penting untuk menentukan berapa level dari *money demand* dan juga *money supply*. Penjelasan atas hal ini adalah berdasarkan persamaan-persamaan berikut:

$$X = X(p, \theta, Y) \quad (30)$$

¹² Money in Islam: A study in Islamic Political Economy. Masudul Alam Choudhury. London, New York: Routledge, 1997

Persamaan (30) menggambarkan tingkat harga yang dihubungkan oleh *socioeconomic variable*, X . Nilai-nilai θ , X , Y dan p bergerak dalam kondisi *joint probability distribution*. Berdasarkan nilai dari θ ini, pasar uang pada dasarnya bergerak dengan kondisi tidak searah (M_d mempengaruhi M_s , dalam artian pemerintah akan menyeimbangkan level *excess demand for money* atau *excess supply of money* lewat kebijakan otoritas moneternya) tetapi terdapat hubungan yang lebih multiplikatif. Bahwa keduanya bergerak bersama membentuk keseimbangan. Sedangkan komponen Y di atas menggambarkan *endogenous policy variable*, yang bisa diwujudkan tata nilai perputaran dan pertukaran uang dengan **mudharabah** dan **musyarakah**¹³.

Dengan kondisi ini **interaksi-integrasi** dan **evolusi** akan timbul dari hubungan *interrelationship* antara $X(p)$ (θ), $Y(\theta)$, dan $M(\theta)$. Hasil akhir dari kondisi ini adalah bahwa penambahan volume dari uang yang beredar hanya akan tergantung dari seberapa besar *spending* dilakukan untuk mencapai *actual demand for goods (and services)* atau dalam arti lain motif penggunaan uang semata-mata untuk transaksi, yang menandakan intrinsikitas *value* dari uang yang begitu pentingnya dalam Islam.¹⁴ Dengan

¹³ Mudharabah didefinisikan sebagai hubungan kerjasama di mana pemilik usaha bertindak sebagai mudarib atau amil untuk mengelola dana yang disediakan oleh pemilik modal (shahibul maal) secara mandiri (discretionary) dengan usaha mudarib. Tata cara usaha disepakati secara besama-sama. Resiko usaha menjadi penanggungjawab pemilik dana kecuali bila ternyata mudarib tidak bertindak sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah disepakati (tidak amanah). Musyarakah didefinisikan sebagai hubungan dua pihak di mana pemilik modal juga berperan dalam kegiatan usaha di sisi lain pelaksana usaha juga ingin menanamkan modalnya, sehingga hubungan yang timbul adalah kemitraan (syirkah)

¹⁴ Perdagangan didefinisikan sebagai serahterima barang yang bisa ditasawufkan melalui interaksi serah (ijab) dan terima (kabal) dengan cara yang tertentu. Dengan demikian adanya uang yang tidak berharga tentu saja bukan merupakan sendi dasar dalam sistem

alur seperti ini maka monetisasi dari variabel harga akan terjaga (hal ini juga merupakan penguat alasan stabilitas harga dalam konsepsi di atas, namun dengan pendekatan jumlah uang beredar). Dalam keseimbangan pasar uang, maka

$M_s = \text{spending demand}$. $M_d = \text{Money demand}$ dalam, keseimbangan berlaku

$$S(Y,P) = L(Y,p) \quad (31)$$

Untuk model *endogen* ini $L(Y,p)$ tidak akan berfluktuasi pada tujuan spekulasi. Hanya transaksi dan *precautionary motive* yang dipenuhi dalam hubungan M_d ini. Dengan kata lain M_d hanya akan menggambarkan keinginan seseorang dalam melakukan transaksi. Di sisi lain M_s tidak hanya akan merupakan fungsi dari otoritas moneter saja melainkan merupakan proses yang berkelanjutan dalam sistem *evolusi knowledge-induced*.¹⁵ Sehingga dalam menuju

perdagangan Islam. **Alm Hishni, Muhammad bin Abi Bakrin, Kifayatul Akhyar, Toha Putera, Semarang, hal 239**

¹⁵ Hal ini diperkuat oleh fakta di jaman kekhalfahan di mana tidak dipusatkannya financial intermediaries pada suatu lembaga pengelola (Perputaran uang dalam masyarakat melibatkan seluruh masyarakat di dalamnya.) Sebagai *moral suasion* dari upaya ini adalah kebijakan Islam di mana masyarakat "dipaksa untuk bekerja keras dan tidak menunggu datangnya rizki". Hal ini akan menjadikan proses *self empowerment* berjalan dengan lebih alami dan baik. Dalam kaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam menentukan perputaran uang, maka dalam negara Islam masyarakat di bagi dalam beberapa katagori: (1) Mereka yang memiliki uang dan bisa memutarnya (dipakai untuk usaha), untuk kelompok ini, pemaksaan dilakukan dengan bentuk bahwa tidak ada alasan untuk tidak memutar aliran uang tersebut. (2) Mereka yang memiliki keterampilan namun tidak memiliki modal dalam bekerja Terhadap mereka, Islam mewajibkan bagi pemilik modal untuk membantu memberi modal (hibah/grant), hutang tanpa bunga, atau melibatkan mereka dalam transaksi Qiradh (bagi hasil) maupun wakalah (agen). Dan bagi pemerintah masih diwajibkan untuk membantunya dengan instrumen zakat maupun tunjangan dari baytul Maal. (3) Mereka yang memiliki modal namun tidak memiliki kemampuan dalam

keseimbangan internal yang berpengaruh adalah θ , yang merupakan komponen pembelajaran dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan terhadap *volatilitas output*, dimana ekspresi dari M cukup hanya tergambar dari deviasi P, sehingga variabel ekonomi dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y \sim M \quad (32a)$$

$$Y \sim p \quad (32b)$$

Dalam ekspresi perubahan akan didapatkan:

$$\text{Log} Y_t = a + b \log (P_t) \quad (33)$$

$$y_t = a + b p_t \quad (34)$$

$$g_1 = B g_2 \quad (35)$$

Persamaan (24) menggambarkan hubungan searah antara output dan tingkat harga, dimana hal ini relevan dengan ekonomi klasik

memutarnya. Terhadap kelompok ini, pemerintah Islam dianjurkan untuk mengusahakan mereka terlibat dalam transaksi Qirodl (bagi hasil), wakalah ataupun syirkah (usaha bersama). (4) adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki kemampuan usaha dan kebercukupan modal sehingga tidak mampu pula untuk berusaha. Terhadap mereka Islam menganjurkan untuk memelihara mereka, tunjangan dari Baytul Maal dan seluruh kebutuhan mereka menjadi tanggung jawab negara: orang-orang cacat, orang jompo, janda-janda. Delain hal di atas baytul maal juga memiliki fungsi antara lain: (1) penerima pemasukan negara (2) penyalur tunjangan negara kepada pihak yang memerlukan. Pemasukan negara yang ditampung dalam baytul Maal adalah: (1) zakat (2) Jizyah (pajak) yang diberikan oleh kaum kafir dzimmi (orang kafir yang berlindung dalam negara islam) (3) harta rampasan perang (4) harta hasil tambang (5) harta hasil jasa pos (5) pajak. Sedangkan penyalurannya adalah kepada: (1) delapan golongan yang ditentukan dalam Al Qur'an (2) Anak yatim yang tidak memiliki uang (3) Janda yang tidak memiliki sumber dan dan tidak memiliki keluarga (4) Anak terlantar/anak jalanan (5) Aparat negara (6) para ilmuwan dan pelajar (7) Untuk kepentingan militer dan pertahanan negara (8) Untuk biaya penelitian, dan lain-lain.

Salah satu tugas institusi baytul Maal yang lain adalah mengaudit ekakayaan tiap-tiap rakyat untuk mengetahui nilai zakat tiap-tiap penduduk disamping sebagai sumber data kekayaan rakyat secara umum (Muhammad Khalid, Ar Rijal Haukar Rasul, Darel Erkam: Beirut 470-471.

bahwa peningkatan output akan *similar* dengan peningkatan harga. **Persamaan (33)** menggambarkan ekspresi **Persamaan (34)** dalam bentuk prosentase perubahan (dalam log). **Persamaan (34)** adalah transformasi regresi dari **Persamaan (32)**, menghubungkan berapa derajat prosentase output akan berubah jika terdapat perubahan pada prosentase perubahan harga. g_1 melambangkan *rate* dari *national income* sedangkan g_2 menggambarkan perubahan dari harga. Karena *Ordinary Least Square* dari persamaan regresi akan menghasilkan $B > 1$ maka $g_1 >> g_2$, dalam hal ini didapatkan hasil bahwa dengan sistem endogen akan tercegah terjadinya inflasi, dengan kata lain kemungkinan kenaikan harga dalam ekonomi tetap ada namun di sisi lain hal tersebut akan lebih cepat di *adjust* oleh kenaikan *income* dengan *share* yang lebih besar.

Dengan demikian, *point* yang didapatkan dari variabel uang dalam Perspektif Islam adalah (1) karena tidak terjadi pemusatan otoritas moneter pada pemerintah dengan *empowerment* yang lebih luas kepada masyarakat, maka masyarakat yang bisa *menentukan future money supply* yang terjadi dalam perekonomian. (2) Efek inflasi akibat kenaikan uang beredar dapat direduksi dengan sistem *knowledge induced* dan sistem *ummah*. Dengan ini, kenaikan Y akan lebih besar daripada kenaikan M itu sendiri dengan adanya *empowerment* perekonomian oleh masyarakat.

COMPARATIVE STUDY

Dengan hasil seperti yang telah diobeservasi di atas maka dapat dilakukan *comparative study* terhadap efektivitas kebijakan makroekonomi sebagai berikut. Kembali ke persamaan awal sebagai perbandingan:

$$y = \delta y_{-1} + \beta (p^e - p) + u \quad (8)$$

$$y = \theta (m - p) + v \quad (9)$$

$$m = M + \gamma y_{-1} \quad (10)$$

$$p^e = 0 \quad (11) \text{ untuk static}$$

$$p^e = E(p-1) \quad (12) \text{ untuk ratex}$$

Dalam konsepsi Islam sebagaimana telah terurai di atas, maka $p^e - p = 0$, pada **Persamaan (8)**, karena memang tidak terjadi ekspektasi terhadap perubahan P (kalau tidak terjadi *market clearing*, dalam kondisi ini, pelaku ekonomi akan tahu ke mana arah pergerakan P dengan sistem *ummah*. $m = M + \gamma y_{-1}$, pada **Persamaan (9)**, hanya akan terjadi pada saat *disequilibrium* di mana pemerintah melakukan campur tangan, dalam kondisi normal persamaan ini akan berubah menjadi $m = M + U$, yang mana menggambarkan *money creation* oleh kegiatan ummat seperti *mudharabah dan musyarakah*. Sampai dengan point ini, maka kondisi akhir masih akan *similar* dengan asumsi ekspektasi statik:

$$y = \frac{(\delta + \gamma\beta)}{1 + \beta/\theta} y_{-1} + \frac{\beta M}{1 + \beta/\theta} + \text{error} \quad (12b)$$

Namun dalam hal ini terdapat perbedaan dari level antisipasi individu terhadap pola pergerakan potensial output. dalam konsepsi Islam, masyarakat bisa menentukan sendiri ke mana level potensial output akan di bawa:

$$y = \frac{(\delta + \gamma\beta)}{1 + \beta/\theta} y_{-1} + \frac{\beta M + U}{1 + \beta/\theta} + \text{error} \quad (12c)$$

Besaran U di atas tentu sangat penting, karena besaran tersebut melukiskan masyarakat sadar perekonomian yang sedang berjalan dan karena kesadaran itu, mereka memiliki *self empowerment* terhadap perekonomian masa depan.

Terhadap Prediksi Masa Depan:

Jika asumsi-asumsi di atas dimasukkan ke dalam persamaan ekonometri untuk diuji, yaitu **Persamaan (14)**, maka

$$Y = \frac{\delta y_{-1}}{(1 + \beta/\theta)} + \frac{\beta m}{(1 + \beta/\theta)} + \text{error term} \quad (14)$$

dengan: $\alpha_1 = (\delta / 1 + \beta/\theta)$ dan $\alpha_2 = \beta / 1 + \beta/\theta$

Maka, lagi-lagi pola pendekatan yang dipakai dalam konsepsi perekonomian mirip dengan proyeksi untuk *static expectation*. Namun ada hal berbeda, bahwa persamaan ini akan memiliki *intercept*. Pemasukan self individual effect baik dari faktor harga maupun jumlah uang beredar, yaitu adanya variabel U , akan lebih memungkinkan perekonomian tidak tergantung dari pemerintah namun juga tidak dilepskan begitu saja (ke dalam sistem pasar). U beserta estimator di dalamnya $\beta/(1+\beta/\theta)$ secara otomatis akan berperan sebagai intercept (α_0). Kondisi ini tentu merupakan hal yang bagus karena dengan konsepsi Islam masyarakatlah yang menentukan pijakan pertama perekonomian itu berjalan (berdasarkan level intercetnya), yaitu dengan Bergeraknya perekonomian ummat.¹⁶

¹⁶ Hal ini sangat sesuai dengan kondisi di zaman kekhalfahan, terutama ketika peran individu memang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian. Konglomerasi yang kaya raya bertindak sebagai lembaga intermediasi: Dalam masa Medinah, banyak individu yang kemudian bertindak sebagai layaknya intermediasi, yaitu sebagai pemberi pinjaman (tanpa bunga), penyerta modal (dalam akad syirkah dan mudarrobah) dan fungsi sosial di mana tidak terdapat dalam fungsi perbankan sekarang, yaitu sebagai penyalur sosial. (Seperti dalam kisah Abdurrahman bin Auf di mana seluruh penduduk Makkah tergantung penghidupan dan pekerjaannya kepada harta beliau dalam melakukan usaha perdagangan. Dari harta Abdurrahman bin Auf tadi 33,33% dipergunakan sebagai dana yang dipinjamkan (fungsi intermediasi), 33,33% untuk membayar hutang-hutang orang yang tidak mampu dan 33% dibagikan dalam bentuk hibah (fungsi sosial). Hal yang sama dengan perbandingan berbeda juga dilakukan oleh Ustman bin Affan dan Abu bakar Ashidiq. **Muhammad Khalid, Ibid hal: 470-471**

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN STUDI

Ekspektasi menjadi sangat penting dalam perekonomian karena bisa melibatkan variabel-variabel ekonomi yang lain, yang apabila bekerja secara kumulatif akan mengakibatkan

pergerakan/fluktuasi/volatilitas dalam perekonomian suatu negara. Pentingnya membicarakan *ekspektasi* tak lepas dari perekonomian global yang semakin terintegrasi menjadi satu kesatuan. Dalam beberapa konsep ekonomi konvensional, ekspektasi akan membawa banyak pengaruh, baik terhadap nilai tukar, besaran inflasi dan tingkat harga. Dari kondisi ini, efek ekspektasi bisa juga mempengaruhi perbedaan prediksi *individual effect* beberapa besaran yang selama ini diyakini (misalnya katakanlah, seperti dalam model Flemming: bahwa *government spendings* akan mutlak berhubungan positif/meningkatkan output nasional).

Dalam konsep ekonomi konvensional terdapat *relevan-irrelevant policy* dan *varian-invariant policy* yang didasarkan pada efek ekspektasi terhadap nilai dari *potensial output*. Sebuah *policy* relevan terjadi jika pemerintah mampu untuk membentuk suatu level perekonomian dengan mempengaruhi tingkat potensial *output* sesuai dengan yang diinginkan dengan *reaction function policy* yang dimiliki. Sebaliknya *invariant policy* adalah kondisi di mana pemerintah tidak akan bisa melakukan apa-apa atas obyek perekonomian sebab pemerintah menghadapi obyek yang bergerak, sehingga *policy* pemerintah tersebut berarti menghadapi obyek ekonomi yang tidak diam tapi juga melakukan reaksi balik.

Atas dasar dua variabel yang memungkinkan terjadinya ekspektasi, yaitu harga dan uang, maka dalam sistem Islam azas *ummah* dan *knowledge induced* dengan kerjasama antara produsen dan konsumen untuk menentukan harga baru setelah ada

pada ketidakseimbangan, melukiskan bahwa ekspektasi akan semakin minimal dalam Konsep Islam sebab masyarakat tahu kemana pergerakan dari harga setelah melewati fase disequilibrium. Efek inflasi akibat kenaikan uang beredar dapat direduksi sebab dengan sistem *knowledge induced* dan sistem *ummah*, maka kenaikan Y akan lebih besar daripada kenaikan M itu sendiri dengan adanya *empowerment* perekonomian oleh masyarakat.

Selain itu mekanisme penentuan harga dan uang dalam Islam akan menyebabkan timbulnya *intercept* pada persamaan ekonometri. Pemasukan *self individual effect* baik dari faktor harga maupun jumlah uang beredar, yaitu adanya variabel U , akan lebih memungkinkan perekonomian tidak tergantung dari pemerintah namun juga tidak dilepskan begitu saja (ke dalam sistem pasar). U beserta estimator di dalamnya merupakan gambaran hal yang bagus karena dengan konsepsi Islam masyarakatlah yang menentukan pijakan pertama perekonomian itu berjalan, yaitu dengan bergeraknya perekonomian ummat.

Selain kesimpulan di atas pendekatan ekspektasi dengan cara Islami ini akan menyebabkan *intrinsic factor* yaitu ekspektasi dalam mempengaruhi variabel perekonomian menjadi semakin kecil. Hal ini akan menyebabkan semakin mengecilnya bias atas hasil prediksi *individual effect* dalam model Mundell-Flemming atas beberapa besaran ekonomi. Maka dengan ini sistem ekspektasi Islami akan membawa pada kondisi *Maximum Likelihood* di mana perekonomian akan mendekati kestabilan seperti yang diinginkan. Sistem ekspektasi yang terbentuk dengan Konsep Islami ini juga lebih memungkinkan pemerintah dan masyarakat bekerja sama, karena hasil akhir yang terwujud adalah *policy irrelevant* dengan tambahan unsur individu. Sedangkan dari segi varian-invariant prediksi ekonometri, ekspektasi yang terbentuk dari Sistem Islami

ini memungkinkan *varian policy* dimana pemerintah juga masih memungkinkan "membantu" perekonomian dengan tetap meletakkan masyarakat sebagai kunci utama (dalam persamaan regresi bisa dilihat dari timbulnya *intercept*).

Namun tidak bisa dipungkiri masih terdapat bahwa *partial equilibrium* ini tentunya tidak akan bisa bagus. Memasukkan ekspektasi Islami (satu dari sekian Nilai-nilai Ekonomi Islami) dalam suatu sistem sedangkan sistem yang lain masih menggunakan pola lama tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Namun dalam hal ini penulis berpendapat bahwa mengasumsikan perekonomian global tunduk pada Perspektif Islam dalam kondisi seperti sekarang tentu masih "kepagian" demikian pula memasukkan seluruh peran ekonomi global melalui *shuratic process* menuju konvergensi Perekonomian Islam tentu masih membutuhkan perjuangan yang keras. Tulisan ini hanya membuktikan bahwa, Islam telah menyediakan jalan terbaik, dan dari jalan terbaik ini akan tetap baik meskipun harus mewarnai sistem yang tidak dikehendaki-Nya, *wallohul muwaffiq ilaa aqwamithorieq*.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab, Buku dan Jurnal

Al Qur'anul Karim

Masudul Alam Choudhuri. (1997), *Money In Islam*, London, Routledge.

Islamic Economics. (1999), Universitas Indonesia, The Center of Middle East and Muamalat Institute. *Module of Certified Islamic Financial Analyst*.

Yusuf Al Qordhowi. (1997) *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*. Jakarta Gema Insani Press.

Greene, William. (2000), *Econometrics Analysis 4th ed*. New Jersey: Prentice Hall. Inc.

Montiel, Peter and Reinhart, Carmen M (1997), *The Dynamics of Capital Movement to emerging Economics*

During 1990's" UNU/WIDER Project on Short Term Capital Movemnet .

Frankel, A. Jeffrey, (1992) *Measuring Internasional Capital Mobility*, Berkeley University of California, AEA Papers May

Okuda, Hidenobu. (1993), *Changing Pattern of Internationl Capital Flows in NIEs and ASEAN Countries*, Hitotsubishi Tokyo, University.

_____, (1996). *The Banking System and Monetary Agregates Following Financial Sector Reforms*, UNU/WIDER

Salvatore, Dominick. (1998). *International Economics*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.

Lipsey, (1993), *Advanced Macroeconomics Beyond IS and LM*, New York McGrawHill.

Manuel Pastor, Jr. (1990) *Capital Flight from Latin Amerika*, Occidental College, Los Angeles,

William Scarth. (2001) *Advanced Macroeconomics*, Horcouth Brace Jovanovich.

William P. Mako. (2001) *Corporate Restructuring in East Asia. Promoting Best Practices, Finance and Development* March.

Frederick S. Mishkin, *Understanding Financial Crises: A Developing Countries Perspective*, IBRD Report, 1997.

Islam dan Sistem Moneter yang Adil, *Majalah Hidayatullah*, Edisi 11/th X. April 1994.

Yusuf Al Qordhowi. (1995) *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fiqtisodil Islam*: Islami Cairo, Makhabbah Wahbah.

As Syuyuthi, *Tarikhul Khulafa*, Dar-El Fikr, Beirut.

Muhammad Asyarbini, *Al Iqna'*: Toha Putera Semarang, Vol. I.

Al, Hishni, Muhammad bib Abi Bakrin, *Kifayatul Akhyar*, AsySyablanji Toha Putera Semarang. *Nur Al Abshoor*. Beirut Dar El Fikri.